



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : KECAMATAN GONDANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA SHOBIHATIN
2. Jabatan : CAMAT GONDANG
3. NHK : 761043

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.640.000.000

1. Tanah Seluas 1.382 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 1.325 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 1.738 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 338 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 751 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah Seluas 494 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 736 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
8. Tanah Seluas 1.944 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 835 m2/325 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 322.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SMASH FD110XCSD / SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



2. MOTOR, HONDA MCB97WIN / SEPEDA MOTOR Tahun 1997,
HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX 150 IE AT / SEPEDA MOTOR
Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOBIL, VW 1600 / STATION WAGON Tahun 1981, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RUSH RUSH 1,5 S NT F 800 RE - G / STATION
WAGON Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	220.767.274
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.282.767.274
III. HUTANG	Rp.	55.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.227.767.274

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.